

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan demokratisasi pada abad terakhir ini sepertinya telah menjadi agenda internasional yang sangat urgen. Dikatakan demikian karena dalam rentan waktu tersebut dapat kita saksikan berlangsungnya berbagai perkembangan sejarah besar. Beberapa fenomena tersebut misalnya runtuhnya berbagai pemerintahan otoriter dan munculnya pemerintahan yang mengagendakan demokratisasi, bertumbuhannya negara-negara komunis yang diikuti oleh tumbuhnya pemerintahan-pemerintahan baru yang lebih pro-demokrasi. Selain itu, gerakan pluralisme internasional pun semakin menguat sehingga seakan-akan mendesak agenda demokratisasi tidak saja dilihat sebagai sebuah kecenderungan intelektual melainkan juga sudah menjelma sebagai kecenderungan politik yang dianut pengambil kebijakan setiap negara saat ini.¹

Bangsa Indonesia pun tidak luput dari persoalan demokratisasi. Bahkan sejak berdirinya, persoalan demokratisasi telah menjadi topik utama bangsa Indonesia. Namun hingga saat ini boleh dikatakan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi tersebut terutama krisis multidimensi yang melanda bangsa ini belum juga

¹ Eep Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 4-5

menunjukkan titik kepuasan sebagaimana diharapkan oleh publik. Justru berbagai persoalan lain yang terjadi semakin menumpuk.

Di tengah situasi bangsa yang mengalami pasang dan surut yang tidak menentu ini, ditambah dengan berbagai macam konflik kesukuan, agama dan ras, maka secara tertentu hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita pada dasarnya belum siap secara mental, sosial, dan kultural untuk hidup dalam suatu ruang kemajemukan.

Berhadapan dengan fenomena kehidupan bangsa tersebut, masyarakat secara keseluruhan masih saja tetap memiliki optimisme yang besar terhadap paham demokrasi. Optimisme masyarakat tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa dengan adanya demokrasi, masyarakat dapat secara bebas mengekspresikan hak politiknya untuk turut mendukung perkembangan kehidupan bangsanya. Selain itu, masyarakat juga berkeyakinan bahwa demokrasi dapat memperlakukan semua orang sama dan sederajat dan mampu menjamin kebebasan-kebebasan dasar masyarakat, bahwa diskusi terbuka, sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial, tidak dapat terwujud tanpa kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi tentang hak-hak sipil dan politis, dan lebih jauh dari itu demokrasi juga diyakini masyarakat dapat memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial masyarakat.² Berkaitan dengan ini, Habermas pun berpendapat bahwa:

² David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi, 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 24

“In the proceduralist paradigm, the client of welfare bureaucracies are filled by enfranchised citizens who participate in political discourses in order to address violated interests and, by articulating new need...”³

Menurut Jürgen Habermas sebagaimana kutipan di atas, dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, hal ini harus dilihat dalam bentuk ruang publik politis yang sehat, dalam arti bebas dan kritis. Artinya, kedaulatan rakyat, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, diidentikkan dengan kondisi-kondisi komunikasi yang membuka kesempatan bagi warga untuk membentuk opini dan kehendak bersama yang dirumuskan secara diskursif sehingga kemudian dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan baru masyarakat.

Sistem demokrasi ini pun tidak luput mendapat perhatian dari filsuf Jürgen Habermas, seorang filsuf Jerman yang lahir di Dusseldorf pada tahun 1929 yang pada masa mudanya, menyadari adanya tindakan kriminal dari rezimnya Hitler, mengedepankan perlu adanya juga demokrasi dalam pemikiran politiknya di kemudian hari.⁴ Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan pemikirannya tentang demokrasi deliberatif. Sumbangan pikiran ini merupakan sebuah desakan untuk membuka ruang-ruang dan kanal-kanal komunikasi politis dalam masyarakat yang

³ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to A Discourse Theory of Law and Democracy*, (Cambridge: MIT Press, 2001), hlm. 439. “Dalam paradigma proseduralis, ruang yang ditinggalkan oleh partisipan-partisipan dalam pasar ekonomi dan orang-orang yang terkait dengan birokrasi negara kesejahteraan diisi oleh warga negara yang kritis dan juga berpartisipasi dalam diskursus politik dalam rangkahan untuk menyetengahkan kepentingan-kepentingan mereka yang terlanggar, dan dengan mengartikulasikan kepentingan serta kebutuhan baru.”

⁴ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer, Inggris-Jerman*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustajka Utama, 2002), hlm. 236

sedang melakukan reformasi politik dan hukum dengan memperhitungkan pluralitas orientasi etnis, religius dan politis.⁵ Pemikirannya ini pun kemudian dilihat sangat relevan dan sangat aktual dengan situasi masyarakat Indonesia, sebagaimana dikemukakan di atas.

Dengan bertolak dari semua hal yang telah dikemukakan, maka saya mencoba mengkajinya dalam suatu bentuk tulisan yang lebih menyeluruh dan komprehensif dengan mengambil judul: **“Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas dalam Konteks Demokrasi Indonesia.”**

1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berusaha memberikan batasan dalam penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan penuntun. Pertanyaan-pertanyaan kunci tersebut yang pertama adalah siapa sosok Jürgen Habermas dan bagaimana latar belakang pemikiran Jürgen Habermas. Kedua, adalah apa yang dimaksudkan oleh Jürgen Habermas dalam teorinya tentang demokrasi deliberatif. Ketiga, bagaimana demokrasi di Indonesia dan perkembangannya. Keempat, adalah apa dampak atau relevansi teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas terhadap sistem politik demokrasi yang berlaku di Indonesia.

⁵ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif, Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 5.

1.3 Tujuan Penulisan.

1.3.1 Inventarisasi

Pada tahap ini, penulis berusaha mempelajari pola pemikiran dari filsuf yang bersangkutan yakni Jürgen Habermas. Terkait dengan hal itu, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber yang dapat membantu penulis dalam proses penyelesaiannya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan basis data kepustakaan. Dengannya dapat mendukung penulis untuk mengkaji pemikiran filsafatnya dan karya-karyanya.

Selain dari hal-hal ini, penulis juga mencoba mempelajari apa yang melatarbelakangi pemikiran dari Jürgen Habermas dan hal-hal yang berkaitan dengan konteks kajian atas filsuf Jürgen Habermas dari penulis sendiri.

1.3.2 Evaluasi Kritis

Berdasarkan pada kajian yang mempertemukan filsuf Jürgen Habermas dalam pemikirannya, penulis berusaha menyajikan sebuah perbandingan yang melibatkan pemikir-pemikir lainnya dengan kualitas pemikirannya masing-masing yang dibandingkan dengan filsuf yang menjadi objek kajian dari penulis demi mendapatkan sebuah karya yang bermutu.

1.3.3 Sintesis

Pada bagian ini, tanpa terpisah dari bagian-bagian terdahulu, penulis berusaha membuat dikotomi antar pemikiran-pemikiran yang dapat memperkaya sudut pandang dan yang sebaliknya. Sintesis ini tetap bertumpu pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

1.3.4 Pemahaman Baru

Bertolak dari segala yang nampak atas kajian yang dibuat, penulis berusaha membuat pendekatan baru yang dapat membawahkan pada sebuah kesinambungan pemikiran yang serba baru. Tentunya tidak terputus atau statis dengan keadaan yang sudah ada.

Penulis memaksudkan adanya sebuah pembaharuan baru dari kajian atas filsuf bersangkutan. Dengan bermodal pada pemikirannya, sekiranya dapat melampaui pemikiran-pemikiran terdahulu yang turut mempengaruhinya dengan memperkenalkan sebuah pendekatan baru yang dapat mengatasi berbagai persoalan.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Untuk Fakultas

Dengan karya ini, disadari oleh penulis sebagai bagian dari tuntutan akademis yang niscaya harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa. Selain itu dengan kehadiran karya ini bagi fakultas adalah demi satu tanggung jawab terhadap tuntutan akhir dari fakultas sebelum melangkah lebih jauh pada proses pengerjaan skripsi.

1.4.2 Untuk Penulis

Sebuah kesadaran akan pentingnya pengembangan kepribadian bagi penulis dirasakan sangatlah penting karena salah satu aspek dalam kehidupan yang sangat urgen adalah tentang kualitas pribadi. Kualitas pribadi tentunya harus berorientasi salah satunya pada pengembangan cakrawala berpikir yang komprehensif, kritis, analitis-argumentatif terhadap situasi hidup manusia yang termaktub di dalamnya adalah aspek sosial, budaya, politik dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Karya ini secara sistematis terdiri dari lima bab. Bab I yakni Pendahuluan, penulis menguraikan beberapa hal mendasar yang mengkonstruksikan sebuah karya tulis ilmiah, di antaranya: Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan sistematika penulisan. Dalam Bab II, penulis menguraikan tentang hal-hal yang memicu atau dengan kata lain, yang menjadi latar belakang dari teori demokrasi deliberasi Jürgen Habermas. Sementara itu dalam Bab III, penulis menguraikan lebih lanjut tentang demokrasi deliberasi itu sendiri beserta prinsip dan ketegangan demokrasi deliberatif. Selanjutnya, Bab IV merupakan tema sentral dari tulisan ini. Dalam Bab IV, penulis lebih mentitik beratkan pembahasan tentang sejauh mana praktek demokrasi di Indonesia dan relevansi dari teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas terhadap demokrasi Indonesia. Akhirnya, dalam Bab V, penulis akan memberikan simpulan mengenai isi dari karya tulis ini, sekaligus penulis akan memberika beberapa butir pemikiran berupa kritikan yang membangun.